



EVALUASI PROGRAM TAHUN 2024



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah mencerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penyusunan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Evaluasi Program Kegiatan ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan informasi pencapaian indikator dan target kinerja dalam sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan. Laporan evaluasi program juga merupakan tolok ukur perbaikan atau menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian program / kegiatan untuk tahun selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman sebagai ukuran pencapaian kinerja BPKAD di masa yang akan datang.

Bangkalan, 29 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
► 1.1. Latar Belakang.....	1
► 1.2. Tujuan.....	1
BAB II CAPAIAN KINERJA	2
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....	5
► 3.1. Permasalahan	5
► 3.2. Rekomendasi.....	5
BAB IV PENUTUP.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian aktivitas dan alat yang terintegrasi dengan sistematik dalam rangka penetapan tujuan, pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berperan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah, selain itu penerapan SAKIP juga berdampak pada penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja.

Pengukuran kinerja pada tahun 2024 dijabarkan dalam Laporan Evaluasi Program Tahun 2024 yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama periode tahun berjalan. Laporan Evaluasi Program merupakan laporan hasil perencanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Program ini memberikan informasi antara perencanaan yang ditargetkan dengan hasil pelaksanaan yang telah dicapai dalam 1 tahun dimana memuat berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Badan Pengelola Keuangan dan aset dDaerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki proses pelaksanaan program dan hasilnya;
2. Menuntun arah kebijakan dan inisiatif-inisiatif program dimasa yang akan datang;
3. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik, termasuk untuk menguji suatu teori sosial atau ekonomi;
4. Meningkatkan akuntabilitas.

BAB II

CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, maka visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategis. Visi dan misi tersebut dirumuskan menjadi sasaran Astrategis BPKAD Kabupaten Bangkalan. Sasaran strategis 2018-2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis BPKAD Kabupaten Bangkalan. Yang memuat 2 sasaran strategis dan 3 program di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pengukuran kinerja terhadap 3 program dan 13 kegiatan menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Bangkalan telah mencapai kinerja yang baik terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memiliki target rendah. Untuk memperoleh data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut.

Untuk mengetahui hasil kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan, maka ditetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1. Standar Pencapaian Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	86 % - 100 %	Sangat Berhasil
2	71 % - 85 %	Berhasil
3	56 % - 70 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui Inovasi, Perencanaan berkualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	a. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	SESUAI	SESUAI	100%
		b. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	0.07	197%
		c. Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	70%	70%
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	a. Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	69,85	99,79%
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	83,78	91,07%

Tabel 2.3. Indikator Capaian Program Kinerja

No	Program	Indikator Program	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	439.960.673.466	100%	439.894.730.935	100%	99,99%
		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP						
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	803.035.850	100%	493.776.402	100%	61,49%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	82,00	37.375.304.127	92,67	36.183.534.734	113,01%	96,81%

Berdasarkan Tabel 2.3. Evaluasi Program BPKAD sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mendapat predikat kinerja “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Adapun capaian anggaran dalam dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 99,99% dari anggaran yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan Administrasi Aset mendapat predikat kinerja “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian anggaran berdasarkan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar 61,49% dari anggaran yang telah ditetapkan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapat predikat kinerja “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sebesar 113,01% dari target yang ditetapkan. Adapun capaian anggaran berdasarkan anggaran pada dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 96,81% dari anggaran yang ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN & REKOMENDASI

3.1 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis dan penggunaan sistem baru dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

2.2. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka rekomendasi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan realokasi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas
2. Keikutsertaan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menguasai pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BPKAD atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Substansi Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 secara umum menyampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
- b. Indikator Capaian Program Kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
- c. Permasalahan dan Rekomendasi di BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Dari hasil Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 diperoleh predikat kinerja sangat berhasil, sangat berhasil, berhasil dan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sudah melaksanakan tahapan penyusunan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.



EVALUASI PROGRAM TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja PD yang Dievaluasi (2024)		Capaian (%)		Evaluasi
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	1.285.225.990	100%	1.234.890.000	100%	96,08%	
		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	439.048.198.971	100%	438.554.571.870	100%	99,89%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan	100%	1.285.225.990	100%	1.234.890.000	100%	96,08%	Koordinasi Perencanaan Anggaran terlaksanaan sesuai dokumen perencanaan
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	20.965.000	2	20.496.000	100%	97,76%	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	20.965.000	2	20.566.000	100%	98,10%	

5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	22.500.000	1	22.446.000	100%	99,76%	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	13.500.000	1	13.026.000	100%	96,49%	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	20.000.000	1	19.950.000	100%	99,75%	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	-	0	-	0%		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	443.687.000	2	422.990.000	100%	95,34%	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	420.362.000	2	401.333.000	100%	95,47%	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	323.246.990	1	314.083.000	100%	97,17%	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	-	-	-	0%	0,00%	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	-	-	-	0%	0,00%	

5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	-	-	-	0%	0,00%	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	72.000.000	100%	71.093.000	100%	98,74%	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2	13.850.000	2	13.850.000	100%	100,00%	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2	24.836.000	2	23.936.000	100%	96,38%	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	18.770.000	2	18.763.000	100%	99,96%	

5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1	14.544.000	1	14.544.000	100%	100,00%	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	-	0	-	0%	0,00%	

5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	43.472.350	100%	40.742.667	100%	93,72%	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	1	-	-	-			
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1	3.022.150	1	2.672.064	100%	88,42%	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	19.487.500	1	19.476.500	100%	99,94%	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	1	20.962.700	1	18.594.103	100%	88,70%	

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	-	-	-				
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	438.932.726.621	100%	438.442.736.203	100%	99,89%	Penyaluran Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota tersalurkan dengan baik	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	428.676.248.700	4	428.674.752.118	100%	100,00%		
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2	1.177.408.495	2	688.914.659	100%	58,51%		

5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	9.079.069.426	4	9.079.069.426	100%	100,00%	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	803.035.850	100%	493.776.402	100%	61,49%	Aset Daerah yang bersertifikat sejumlah 77 bidang
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%	803.035.850	100%	493.776.402	100%	61,49%	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	235.240.400	2	231.457.200	100%	98,39%	

5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14	-	0				
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	480.240.750	5	182.284.802	100%	37,96%	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	87.554.700	4	80.034.400	100%	91,41%	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	82,00	37.377.074.491	92,67	35.828.117.338	113,01%	95,86%	

5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	7.056.600	100%	6.316.300	100%	89,51%	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2.727.650	2	2.005.500	100%	73,52%	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.215.850	1	1.202.500	100%	98,90%	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.086.700	1	1.084.800	100%	99,83%	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	2.026.400	6	2.023.500	100%	99,86%	

5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani secara tepat waktu	100%	32.746.324.903	100%	31.458.107.990	100,0%	96,07%	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	32.727.399.103	51	31.439.431.390	100%	96,06%	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	13.776.850	2	13.536.300	100%	98,25%	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	5.148.950	4	5.140.300	100%	99,83%	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dengan baik	100%	1.951.200	100%	1.904.200	100%	97,59%	Anggaran dari kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdampak refocusing dan disesuaikan dengan kebutuhan

5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	1.951.200	14	1.904.200	100%	97,59%	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	6.628.363	100%	5.826.000	100%	87,90%	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	6.628.363	1	5.826.000	100%	87,90%	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	-	0	-	0%	0,00%	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67	-	-	-	-	-	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%	365.261.585	100%	355.229.084	100%	97,25%	Beberapa sub kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah terhambat karena adanya refocusing anggaran
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5.614.200	4	4.737.350	100%	84,38%	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	64.784.385	18	60.625.300	100%	93,58%	

5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10.170.000	1	9.486.000	100%	93,27%	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	79.821.000	1	77.350.000	100%	96,90%	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4.860.000	1	3.840.000	100%	79,01%	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	10.500.000	4	9.934.100	100%	94,61%	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	189.512.000	4	189.256.334	100%	99,87%	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	-	-	-	-	-	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	-	-	-	-	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.998.607.364	100%	3.788.965.608	100%	94,76%	Anggaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdampak refocusing kemudian

									disesuaikan dengan kebutuhan
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	500.000	4	234.270	100%	46,85%	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	250.262.364	4	249.610.360	100%	99,74%	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	3.747.845.000	4	3.539.120.978	100%	94,43%	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	251.244.476	100%	211.768.156	100%	84,29%	Beberapa pemeliharaan Barang Milik Daerah terhambat karena adanya refocusing anggaran
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	103.434.300	22	88.739.325	100%	85,79%	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	69.892.640	51	51.298.831	100%	73,40%	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167	67.917.536	167	61.730.000	100%	90,89%	

5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10.000.000	1	10.000.000	100%	100,00%	
-------------------	--	--	---	------------	---	------------	------	---------	--